

# BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 DESEMBER  
2023 (AUDITED)

Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur  
Jakarta 14430

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 08 Mei 2024

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan,

A. RITA TISIANA DWI KUSWARDANI

# BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

*GEDUNG BRSDM KP II, KOMPLEK BINA SAMUDERA  
JALAN PASIR PUTIH I ANCOL TIMUR JAKARTA 14430 TELEPON (021) 64711583 (LACAK)  
FAKSIMIL (021) 64700924 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [sosek@kkp.go.id](mailto:sosek@kkp.go.id)*

---

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 08 Mei 2024

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani  
NIP. 197204102002122003

Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.250.000,00 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 12.250.000,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 13.311.010.086,00 atau mencapai 98,24 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 13.550.000.000,00

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023 .

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.215.263.251,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 24.866.435,00 Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 1.091.128.272,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 108.701.144,00 . Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 1.224.695.851,00;

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 13.634.016.598,00

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(13.634.016.598,00) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(721.020.000,00) dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (14.355.036.598,00)

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp2.277.987.363,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(14.355.036.598,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi dan Lain-Lain masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.985.000,00 serta Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.298.760.086,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 1.224.695.851,00

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	12,250,000	0.00	65,164,106
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>12,250,000</b>	0.00	<b>65,164,106</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	6,686,000,000	6,639,468,031	99.30	8,887,404,738
Belanja Barang	B.4	6,864,000,000	6,671,542,055	97.20	2,742,883,705
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Pinjaman dan Hibah					
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>13,550,000,000</b>	<b>13,311,010,086</b>	<b>98.24</b>	<b>11,630,288,443</b>

**BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
	Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.2	-	-
	Piutang Bukan Pajak	C.3	9,480,000	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.4	(47,400)	-
	Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
	Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
	Persediaan	C.9	15,433,835	5,674,929
	Jumlah Aset Lancar		24,866,435	5,674,929
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>				
	Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
	Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
	Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>				
	Tanah	C.13	-	-
	Peralatan dan Mesin	C.14	5,963,469,718	5,963,469,718
	Gedung dan Bangunan	C.15	-	-
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
	Aset Tetap Lainnya	C.17	517,203,788	1,250,473,788
	Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(5,389,545,234)	(5,070,218,841)
	Jumlah Aset Tetap		1,091,128,272	2,143,724,665
<b>ASET LAINNYA</b>				
	Aset Tak Berwujud	C.20	377,835,394	377,835,394
	Aset Lain-Lain	C.21	-	172,060,000
	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(269,134,250)	(421,307,625)
	Jumlah Aset Lainnya		108,701,144	128,587,769
<b>JUMLAH ASET</b>			<b>1,224,695,851</b>	<b>2,277,987,363</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN</b>				
	Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
	Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	-
	Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>				
	Ekuitas	C.26	1,224,695,851	2,277,987,363
<b>JUMLAH EKUITAS</b>			<b>1,224,695,851</b>	<b>2,277,987,363</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			<b>1,224,695,851</b>	<b>2,277,987,363</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

1. (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	6,632,988,031	8,887,404,738
Beban Persediaan	D.3	130,909,443	128,607,698
Beban Barang dan Jasa	D.4	3,008,018,618	2,152,825,301
Beban Pemeliharaan	D.5	937,151,401	240,578,983
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,585,703,687	249,406,579
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	339,213,018	466,741,391
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	32,400	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>13,634,016,598</b>	<b>12,125,564,690</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(13,634,016,598)</b>	<b>(12,125,564,690)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar		-	46,000,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		733,270,000	
<b>SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		<b>(733,270,000)</b>	<b>46,000,000</b>
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya		12,250,000	19,164,106
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		-	-
Defisit Selisih			
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>(721,020,000)</b>	<b>65,164,106</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(14,355,036,598)</b>	<b>(12,060,400,584)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(14,355,036,598)</b>	<b>(12,060,400,584)</b>

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	2,277,987,363	3,038,617,895
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14,355,036,598)	(12,060,400,584)
<b>PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN</b>	E.3		
Penyesuaian Nilai Aset	E.4		
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.5		
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.6	2,985,000	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.7		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.8		
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.9		
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.10		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.11	2,985,000	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.12	13,298,760,086	11,299,770,052
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(1,053,291,512)	(760,630,532)
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>1,224,695,851</b>	<b>2,277,987,363</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Riset Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BRSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan keuangan

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;

5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

**a. Sub Bagian Umum**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan urusan kearsipan dan persuratan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan kebutuhan prasarana dan sarana serta pengelolaan aset.

**b. Koordinator**

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator menjalankan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program dan anggaran, pengumpulan data, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan;
- 2) Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan;
- 3) Pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, dan tata laksana;
- 4) Perumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan, Pelaksanaan analisis kebijakan dibidang ekonomi makro, investarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan ahli teknologi,

- sosial budaya masyarakat, politik dan hukum kelautan dan perikanan;
- 5) Komunikasi dan Kerjasama semua pihak yang mendukung kegiatan sosial ekonomi;
  - 6) Pelaksanaan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
  - 7) Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan informasi pelayanan jasa sosial ekonomi kelautan dan perikanan serta Pengelolaan data dan informasi.

### **c. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan manajerial di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan ahli teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

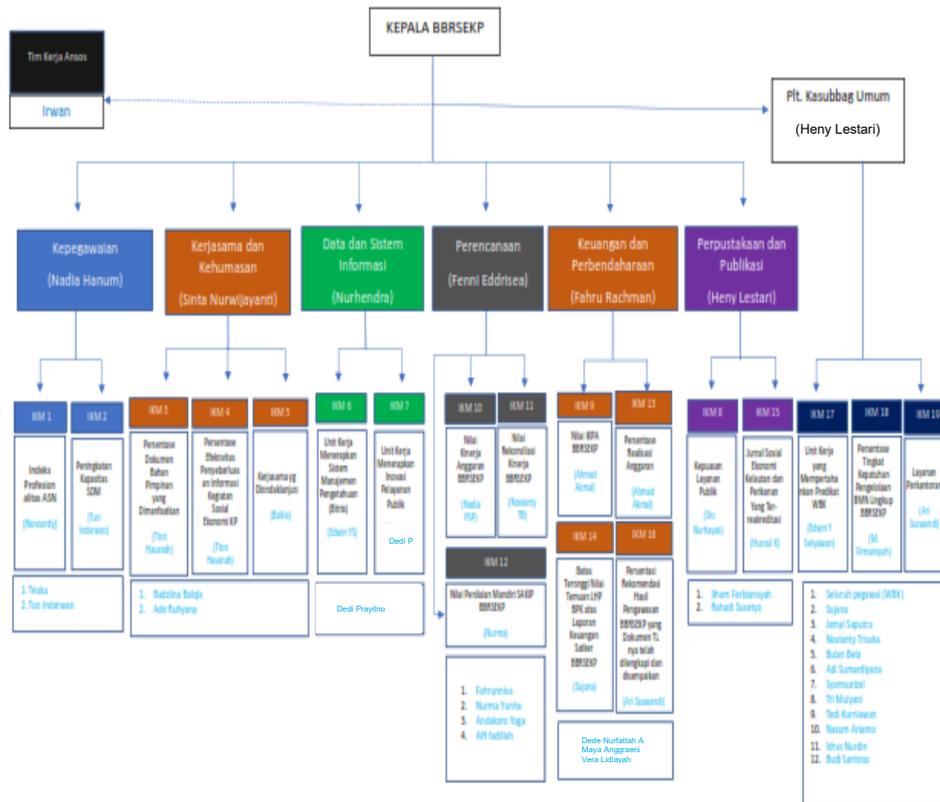
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- 1) Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Sosial Ekonomi, Pustakawan, dan Jabatan Fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala;
- 3) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata

Keajaian Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.

**Gambar 1 . Struktur Organisasi BBRSEKP**



Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan arahan bagi BBRSEKP dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam periode waktu lima tahun secara menyeluruh terintegrasi dan sinergis. Renstra BBRSEKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Undang-Undang Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nasional (2020-2024), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.

Peran strategis Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai institusi riset yang menghasilkan rekomendasi kebijakan social ekonomi kelautan dan perikanan sebagai dasar pengambilan keputusan para pemangku kebijakan (science based policy) yaitu kebijakan pembangunan berbasis pada riset dan inovasi. Konsep ini merupakan bagian dari tahapan visi presiden 2020-2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

#### 1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Visi KKP ini merupakan perwujudan Visi Presiden terpilih menetapkan visi 2020 – 2024 dalam sektor kelautan dan perikanan.

BRSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mendukung visi KKP. Visi BRSDMKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BRSDM mempunyai visi yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BRSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2024 adalah

**“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai berikut:

Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsisten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengingkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP

## 2. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi BRSDM yang menjalankan misi Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

1. Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi BBRSEKP, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;

2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan
3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

### 3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (science based policy);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;

## **A.2. KERAGAMAN SDM BBRSEKP**

*“Sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi”*

Pada tahun 2023, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki 64 orang pegawai yang terdiri dari 40 PNS, 1 PPPK, 17 PPNPN dan 4 Tenaga Outsourcing. Komposisi dari pegawai BBRSEKP sebagai berikut :

## Komposisi Pegawai



**Gambar 2. Keragaan SDM BBRSEKP**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, diantaranya adalah

a. Perpustakaan

Perpustakaan BBRSEKP merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan penelitian, dalam rangka peningkatan kualitas serta tugas dan fungsi BBRSEKP. Perpustakaan BBRSEKP telah menjalankan perannya sebagai pusat penyediaan informasi berupa bahan pustaka, bahan rujukan, penyedia literatur untuk meningkatkan kompetensi peneliti BBRSEKP. Koleksi perpustakaan BBRSEKP terdiri dari buku referensi, buku hasil penelitian, koleksi digital (e-books, e-journals), koleksi audiovisual dan lain-lain. Selain itu untuk

meningkatkan pelayanannya, perpustakaan BBRSEKP masih terus mengembangkan system perpustakaan digital (<http://bbpse.litbang.kkp.go.id/perpustakaan>)

Pengembangan perpustakaan digital dimaksudkan agar layanan perpustakaan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna khususnya pegawai BBRSEKP selain itu kerjasama antar perpustakaan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi khususnya unit kerja yang ada untuk dapat melaksanakan “resource sharing” dapat terjalin.

b. Laboratorium Sosial Ekonomi

Untuk mewujudkan Balai Besar Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagai Center of excellent dalam lingkup manajemen hasil penelitian dan pengelolaan data sosial ekonomi kelautan dan perikanan, saat ini BBRSEKP sedang dalam tahap pembangunan Laboratorium Sosial Ekonomi. Laboratorium Sosial Ekonomi adalah sebuah pusat manajemen dan sistem komputasi data sosial ekonomi kelautan dan perikanan untuk optimalisasi peran institusi di dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi dan masyarakat kelautan dan perikanan.

Kegiatan utama yang dilakukan Laboratorium Sosial Ekonomi adalah (1) penyebaran informasi dan hasil penelitian; (2) mengembangkan model komputasi penelitian sosial ekonomi yang mendukung pengembangan masyarakat dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan (3) pelayanan konsultasi dan penelitian serta penanganan masalah masalah sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

c. Sarana dan prasarana lainnya

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan tidak memiliki aset berupa tanah dan gedung/bangunan. Kantor yang ditempati adalah kantor milik Sekretariat BRSDMKP yaitu di Gedung BRSDMKP 1 di Jalan Pasir Putih 1 Ancol Jakarta Utara. Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki dan dikelola meliputi sarana dan prasarana riset yang terdiri atas: kendaraan operasional, laptop/komputer, kamera/handycam /alat perekam lainnya, perpustakaan, laboratorium data, software pengolah data;

dan sarana dan prasarana non riset yang terdiri atas kendaraan pimpinan, meubelair, dan peralatan perkantoran lainnya. Sarana dan prasarana di atas merupakan bagian dari aset/barang milik negara (BMN). Dalam rangka akreditasi dan penguatan laboratorium sosial ekonomi, dukungan sarana dan prasarana akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan laboratorium sosial ekonomi untuk mengoptimalkan peran intitusi sebagai penyedia data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

#### A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis  
Akuntansi

#### A.3. BASIS AKUNTANSI

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas

adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Dasar Pengukuran

##### A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### Kebijakan Akuntansi

##### A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

**A. Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi

(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## Aset Tetap

### B. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan  
Aset tetap

#### C. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang  
Jangka  
Panjang

#### D. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/d dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### Aset Lainnya

#### E. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- Aset tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia, Dagang, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20
Tanaman Semusim	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Petunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangkan akumulasi penyusutan.

## Kewajiban

### (6). Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7). Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali

(8). Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 6 (delapan) kali dari DIPA awal, pagu awal Sebesar Rp10.550.000.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp13.550.000.000,00.

Sehingga pagu Anggaran terlihat sebagai berikut ini:

Uraian	2023	
	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	7,300,000,000	6,686,000,000.00
Belanja Barang	3,250,000,000	6,864,000,000.00
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	10,550,000,000.00	13,550,000,000.00

Revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp 614.000.000,00 pada anggaran belanja gaji pokok, pembulatan gaji, tunjangan suami/istri, tunjangan struktural, tunjangan beras, uang makan, tunjangan umum, uang lembur dan tunjangan khusus. Penambahan pagu belanja barang sebesar Rp Rp3.614.000.000,00 merupakan penambahan KRO NSPK, berupa kegiatan Assesment Identifikasi dan Penyusunan Model Rancangan Rekayasa Sosial Program Kampung Nelayan Maju sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pergeseran anggaran Belanja Pegawai ke Belanja Operasional sebesar Rp614.000.000.00

Realisasi  
Pendapatan Negara  
dan Hibah  
Rp12.250.000,00

### B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.250.000,00 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP 2023  
(Dalam Rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	(%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	12,250,000	-
Pendapatan Anggaran Lain - Lain	-		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>12,250,000</b>	<b>-</b>

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022  
(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya	12,250,000	65,164,106	(81.20)
<b>Jumlah</b>	<b>12,250,000</b>	<b>65,164,106</b>	<b>(81.20)</b>

Realisasi Pendapatan TA 2023 adanya pendapatan pengembalian belanja pegawai tahun yang lalu merupakan dari pengembalian Tunjangan struktural dari bulan November 2022 sd November 2023 sebesar Rp12.250.000,00,- terdiri dari

- Pengembalian gaji fungsional an Fenni Eddrisea sebesar Rp12.250.000,00

#### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp12.250.000,00 dan Rp65,164,106,00 . Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited)  
TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12,250,000	65,164,106	(81.20)
<b>Jumlah</b>	<b>12,250,000</b>	<b>65,164,106</b>	<b>(81.20)</b>

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	Kenaikan / Penurunan (%)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun	12,250,000	19,164,106	-36.08
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	46,000,000	0.00
Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya			
<b>Jumlah</b>	<b>12,250,000</b>	<b>65,164,106</b>	<b>(81.20)</b>

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami penurunan sebesar 81.20 dari TA 2022 dikarenakan tidak adanya target yang dihasilkan dari PNBP fungsional tahun ini pada tahun 2023 merupakan PNBP umum yang merupakan pengembalian Belanja Pegawai Tahun yang Lalu

## B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp13.311.010.086,00 atau 98.24 % dari anggaran belanja sebesar Rp13.550.000.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja  
Rp  
13.311.010.086,00

Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited)  
TA 2023

(Dalam Rupiah)

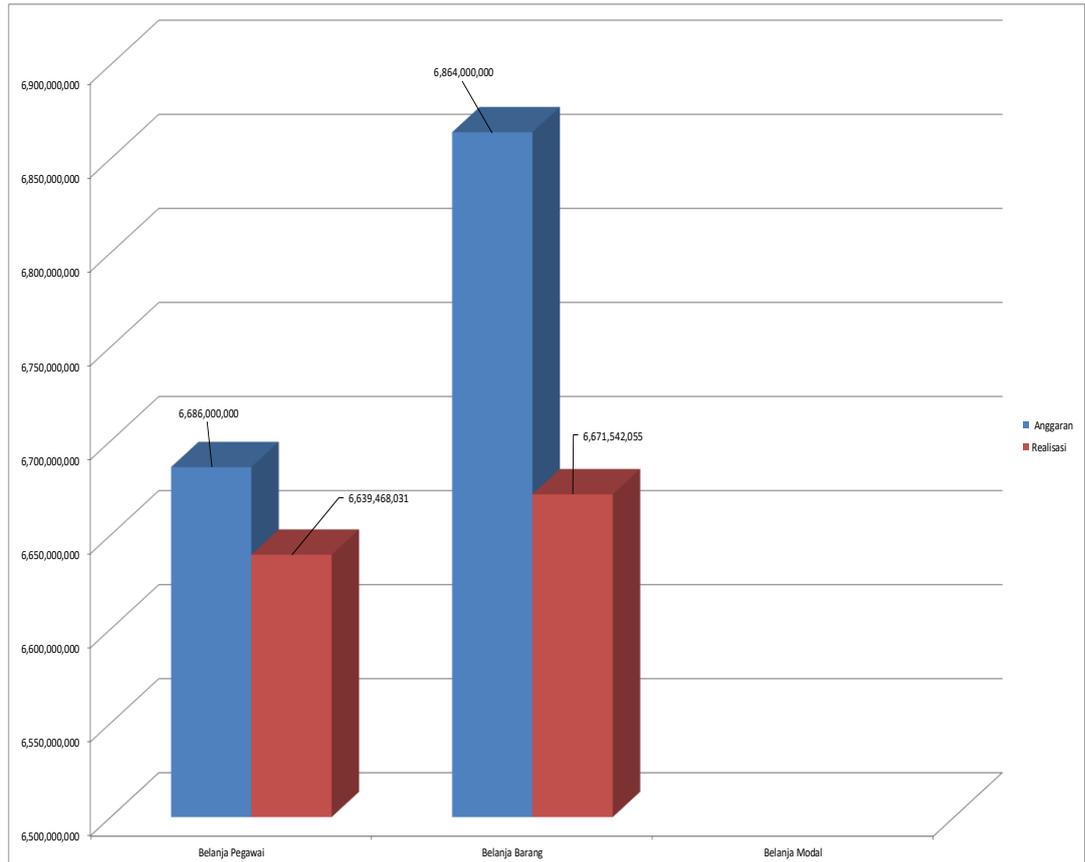
Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	(%)
Belanja Pegawai	6,686,000,000	6,639,468,361	99.30
Belanja Barang	6,864,000,000	6,671,941,055	97.20
Belanja Modal	-		0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>13,550,000,000</b>	<b>13,311,409,416</b>	<b>98.24</b>
Pengembalian Belanja		399,330	
Dana PHLN Hibah			
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>13,550,000,000</b>	<b>13,311,010,086</b>	<b>98.24</b>

Realisasi belanja senilai Rp13.311.010,00 terdiri dari:

1. Pelayanan Kehumasan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 105.109.168,00
2. Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 185.337.693,00
3. Pelayanan Data Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 151.553.817,00
4. Pelayanan Sistem Informasi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 63.144.400,00
5. Gaji dan Tunjangan dengan total realisasi Rp 6.439.340.355,00
6. Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan total sebesar Rp 2.805.511.584,00
7. Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 117.871.057,00
8. Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 114.538.683,00
9. Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 109.183.180,00
10. Pelayanan Keuangan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 129.157.842,00
11. Penyusunan NSPK Standarisasi dan Sertifikasi sebesar Rp 2.895.801.071,00

Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran telah sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan Penelitian dan Rencana Operasional Kegiatan Manajerial. Adapun persentase penyerapan anggaran sebesar 98.24% merupakan bagian dari kebijakan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Gambar 1. Grafik Realisasi Belanja Tahun 2023

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 14.45%

Tabel 8. *Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022*

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	6,639,468,031	8,892,522,738	-25.34
Belanja Barang	6,671,542,055	2,737,765,705	143.69
Belanja Modal			
<b>Jumlah</b>	<b>13,311,010,086</b>	<b>11,630,288,443</b>	<b>14.45</b>

Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 14.45% dibandingkan pada TA 2022. Hal ini disebabkan:

Adanya penambahan pagu terkait kegiatan Assesment Identifikasi dan Penyusunan Model Rancangan Rekayasa Sosial Program Kampung Nelayan Maju sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Pergeseran anggaran Belanja Pegawai ke Belanja Operasional sebesar Rp614.000.000.00

1. Adanya penambahan kegiatan Assesment Identifikasi dan Penyusunan Model Rancangan Rekayasa Sosial Program Kampung Nelayan Maju sebesar Rp3.000.000.000,00
2. Adanya pergeseran anggaran Belanja Pegawai ke Belanja Operasional sebesar Rp614.000.000.00

Belanja Pegawai Rp  
6.639.468.031,00

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.639.468.031,00 dan Rp8.887.404.738,00 . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan sebesar 25.29 % dari TA 2022 Hal ini disebabkan oleh perpindahan pegawai ex peneliti ke Badan Riset Inovasi Nasional antara lain adanya 14 pegawai akibat mutasi dan tugas belajar.

Tabel 9 . *Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022*  
(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,103,601,700	2,721,898,180	(22.72)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	35,373	40,043	(11.66)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	157,384,040	226,330,760	(30.46)
Belanja Tunj. Anak PNS	50,588,816	69,486,524	(27.20)
Belanja Tunj. Struktural PNS	34,830,000	74,520,000	(53.26)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	463,665,000	961,461,000	(51.77)
Belanja Tunj. PPh PNS	13,113,132	44,890,232	(70.79)
Belanja Tunj. Beras PNS	124,996,920	167,797,140	(25.51)
Belanja Uang Makan PNS	227,374,750	340,857,000	(33.29)
Belanja Tunjangan Umum PNS	18,160,000	15,535,000	16.90
Belanja Uang Lembur	4,456,000	27,922,000	(84.04)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,343,701,966	4,258,255,692	(21.48)
Belanja Gaji Pokok PPPK	31,992,900	0	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	611	0	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,012,690	0	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	211,776	0	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5,580,000	0	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,593,240	0	
Belanja Uang Makan PPPK	5,546,550	0	
Belanja Uang Lembur PPPK	0	0	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	50,622,897	0	
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>6,639,468,361</b>	<b>8,908,993,571</b>	<b>(25.47)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	330	21,588,833	(100.00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6,639,468,031</b>	<b>8,887,404,738</b>	<b>(25.29)</b>

Belanja pegawai sebesar Rp6.639.468.361,00 terjadi pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp330,00 sebagai berikut :

- Belanja Tunjangan Pembulatan Gaji sebesar Rp.330,00;

Sehingga realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.639.468.031,00

Belanja Barang Rp  
6.671.542.055,00

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.671.542.055,00 dan Rp2.742.883.705,00. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan

Tabel 10. Perbandingan belanja barang tahunan (Audited)

## TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,709,824,394	1,892,622,103	-9.66
Belanja Barang Non Operasional	570,204,024	153,371,200	271.78
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	141,268,349	114,500,170	23.38
Belanja Pemeliharaan	937,151,401	226,431,759	313.88
Belanja jasa	727,990,200	106,831,998	581.43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,585,502,687	249,406,579	936.66
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda			0.00
Jumlah Belanja Kotor	6,671,941,055	2,743,163,809	143.22
<i>Pengembalian Belanja Barang</i>	399,000	280,104	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6,671,542,055</b>	<b>2,742,883,705</b>	<b>143.23</b>

Realisasi tersebut mengalami kenaikan 143.23 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan:

1. Adanya penambahan kegiatan Assesment Identifikasi dan Penyusunan Model Rancangan Rekayasa Sosial Program Kampung Nelayan Maju sebesar Rp3.000.000.000,00
2. Adanya pergeseran anggaran Belanja Pegawai ke Belanja Operasional sebesar Rp614.000.000.00

Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi kelautan dan Perikanan mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp19.814.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp19.812.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	19,814,000	19,812,435	99.99
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-		
<b>Jumlah</b>		19,814,000	19,812,435	99.99

Pengembalian belanja sebesar Rp399.330,00 Berupa

1. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp330,00;
2. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa an. Fenni Edderisea sebesar Rp120.000,00;
3. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa an. Fahru Rachman sebesar Rp120.000,00;
4. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota an. M.Firmansyah sebesar Rp52.000,00;
5. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa an. Nurma Yunita sebesar Rp32.000,00;
6. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa an. A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani sebesar Rp75.000,00;

Belanja Modal Rp,  
0,00

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 00,00 . Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022**

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Tidak terdapat belanja modal untuk sarana dan prasarana

**Belanja Modal** **B.5.1 Belanja Modal. Peralatan dan Mesin**

**peralatan dan** Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan  
**Mesin Rp0,00** 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh Realisasi belanja modal peralatan dan mesin rendah dibanding periode sebelumnya karena secara persentase terhadap pagu anggarannya, lebih rendah daripada periode sebelumnya.

**Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022**

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan kantor dan alat rumah tangga	0	0	0
Alat angkut	0	0	0
Peralatan laboratorium	0	0	0
Peralatan komputer	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh penuruanan anggaran atau tidak terdapat mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin.

**B.5.2 Belanja Modal lainnya**

**Belanja Modal**  
**Lainnya**  
**sebesar**  
**Rp.0,00**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan adaya penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya dan Realisasi belanja modal peralatan dan mesin rendah dibanding periode sebelumnya karena secara persentase terhadap pagu anggarannya, lebih rendah daripada periode sebelumnya.

**Tabel 13. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022**

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00

Tidak terdapat mutasi BMN berupa Aset Tak Berwujud terdapat pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,00

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Saldo Menurut Rekening Koran	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
BP Uang Muka/Voucher	-	-
Kuitansi UP	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sisa TUP telah disetor ke kas negara dengan NTB nomor 000000228259 dan NTPN nomor FDAD60JUNV99D9G0 tanggal 30 Desember 2023

Persediaan  
Rp15.433.835,00

### C.3. Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp15,433,835,00 dan Rp5,674,929,00 . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Barang Konsumsi	15,433,835	5,674,929
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>15,433,835</b>	<b>5,674,929</b>

Tabel 14. Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA  
2023 dan 2022

Kode	Uraian Akun	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>117111</b>	<b>BARANG KONSUMSI</b>		
1.01.03.01.001	Alat Tulis	11,450	317,166
1.01.03.01.002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	76,500	-
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	1,081,520	1,023,350
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor	147,880	816,040
1.01.03.01.005	Buku Tulis	10,000	377,910
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	1,178,375	25,000
1.01.03.01.007	Penggaris	128,910	257,820
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	108,000	140,400
1.01.03.01.010	Alat Perekat	1,083,970	724,731
1.01.03.01.014	Barang Cetak		-
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	652,350	481,620
1.01.03.02.001	Kertas HVS	3,529,500	343,000
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	632,320	579,950
1.01.03.02.004	Amplop		95,172
1.01.03.04.003	Pita Printer	-	-
1.01.03.04.004	Tinta/Toner Printer	4,913,850	-
1.01.03.04.006	USB/Flashdisk	569,000	-
1.01.03.04.010	Mouse	885,860	-
1.01.03.04.011	CD/DVD	-	-
1.01.03.04.999	Bahan Komputer Lainnya		
1.01.03.06.010	Batu Baterai	424,350	492,770
1.01.03.99.999	Bahan Keg. Kantor Lainnya		
<b>JUMLAH BARANG KONSUMSI</b>		<b>15,433,835</b>	<b>5,674,929</b>
<b>115113</b>	<b>BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN</b>		
1.0 1.03.05.008	Bahan Kimia Untuk Pembersih		
1.0 1.03.05.999	Perabot Kantor Lainnya	-	-
<b>JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>115114</b>	<b>SUKU CADANG</b>		
1.01.02.04.012	Suku Cadang Alat Laboratori	-	-
1.01.02.04.013	Suku Cadang Alat Laboratori	-	-
1.01.02.04.999	Suku Cadang Alat Laboratori	-	-
<b>JUMLAH SUKU CADANG</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>115131</b>	<b>BAHAN BAKU</b>		
1.01.01.02.999	Bahan Kimia Lainnya	Rp -	Rp -
1.01.01.05.999	Bahan Baku Lainnya	Rp -	Rp -
<b>JUMLAH BAHAN BAKU</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>117199</b>	<b>PERSEDIAAN LAINNYA</b>		
1.01.04.01.999	Obat Lainnya	Rp -	Rp -
<b>JUMLAH PERSEDIAAN LAINNYA</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 15,433,835</b>	<b>Rp 5,674,929</b>

Mutasi Persediaan pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Mutasi Persediaan pada 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI
<b>SALDO AWAL, Per 31 Des 2022</b>	<b>5,674,929</b>
Barang Habis Pakai	
Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>145,011,789</b>
<b>a) Pembelian</b>	145,011,789
- Barang Habis Pakai	145,011,789
- Selisih Reklas Masuk dan Reklas Keluar	
- Persediaan utk Diserahkan kpd Masyarakat/Pemda	
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>135,252,883</b>
Habis Pakai	135,252,883
Rusak/Usang	
Diserahkan kepada Pemda	
<b>SALDO AKHIR Per 31 Desember 2022</b>	<b>15,433,835</b>

Saldo awal Barang Habis Pakai per 31 Desember 2023 senilai **Rp5.674.929,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, - terdapat pembelian Barang Habis Pakai senilai **Rp145.011.789,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya, usb/flash disk. dan terdapat selisih nilai Reklas Masuk dan Reklas Keluar senilai **Rp594.000,00** Terdapat pemakaian barang Habis pakai barang konsumsi yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor selama periode per 31 Desember 2023 senilai **Rp135.252.883,00** dan Saldo Akhir senilai **Rp15.433.835,00** berupa alat tulis, penjepit kertas, penghapus/korektor, ordner dan map, penggaris, cutter (alat tulis kantor), alat perekat, alat tulis kantor lainnya, berbagai kertas, kertas dan cover lainnya. Semua persediaan dalam keadaan baik.

Peralatan dan Mesin  
Rp5.963.469.718,00

#### C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp5.963.469.718,00 dan Rp5.963.469.718.00. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Per 31 Desember 2022	5,963,469,718
<b>Mutasi Tambah</b>	-
Pembelian (101)	
Transfer Masuk (102)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	-
Pengembangan Nilai Aset	
Mutasi Tambah Penunjang Operasional	
Pengembangan melalui KDP	-
<b>Mutasi Kurang</b>	-
Reklasifikasi keluar	
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>5,963,469,718</b>
Akumulasi Penyusutan	-5,389,545,234
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>573,924,484</b>

Saldo akhir Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai **Rp5.963.469.718.00** tidak terdapat mutasi tambah

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada laporan keuangan ini

Aset Tetap Lainnya  
Rp517.203.788,00

#### C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp517,203,788 dan Rp1.250.473.788. Aset tetap tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 13 paket dengan nilai sebesar Rp1.250.473.788,00, mutasi tambah sejumlah 0 paket dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sejumlah 1 paket dengan nilai sebesar Rp733.270.000,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
<b>SALDO AWAL, Per 31 Des 2022</b>	<b>1,250,473,788</b>
Normalisasi Data	
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>-</b>
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>733,270,000</b>
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	<b>733,270,000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2022</b>	<b>517,203,788</b>

Terdapat mutasi kurang sebesar Rp733.270.000,00 merupakan penghapusan aset lainnya yang sudah mendapat persetujuan dari KPKNL dan Surat Keputusannya sedang menunggu dari Biro Keuangan KKP.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp5.389.545.234,00

### C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing Rp(5.389.545.234,00) dan Rp(5.070.218.841,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
TA 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,963,469,718	(5,389,545,234)	573,924,484
2	Aset Tetap Lainnya	1,250,473,788		1,250,473,788
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>7,213,943,506</b>	<b>(5,389,545,234)</b>	<b>1,824,398,272</b>

Aset tak berwujud  
Rp377.835.394,00

### C.7. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp377,835,394,00 dan Rp377,835,394,00. Aset Tak Berwujud

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan berupa Software. Adapun rincian mutasi ATB per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
162151	Software Komputer	20	Rp 278,300,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	4	Rp 99,535,394
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan (Software Komputer)	1	Rp 172,060,000
Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		24	Rp 377,835,394

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut

Tabel 19. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2022	377,835,394
Normalisasi Data	-
Mutasi Tambah	
- Pembelian	
Mutasi Kurang	
Saldo Per 31 Desember 2023	377,835,394
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	377,835,394

Nilai Buku pada ATB per 31 Desember 2023 senilai **Rp377.835.394,00**

### C.8. Aset Lain Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah 0 dan Rp172.060.00,00 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Aset Lain-lain  
Rp172.060.000,00

Uraian	Nilai
SALDO AWAL, Per 31 Des 2023	172,060,000
Mutasi Tambah	-
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang	-
Penghapusan BMN yang dihentikan	172,060,000
Penggunaan Kembali BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2023 berupa Software Komputer dan Aset Tak Berwujud Lainnya sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp172.060.000,- telah dilaksanakan Penghentian Penggunaan BMN sesuai Surat Permohonan Penghapusan BMN dari Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ke Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP Nomor : 438/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 2022 tanggal 4 Juli 2023..

### **C.9. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp (269.134.250) dan Rp(421.307.625). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan  
dan Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp(269.134.250,00)

Tabel 20. Rincian Akumulasi  
Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	278,300,000	249,247,625	29,052,375
ATB Lainnya	99,535,394	19,886,625	79,648,769
<b>Operasional Pemerintahan</b>	377,835,394	269,134,250	108,701,144
Aset Lain lian			0
<b>Jumlah</b>	<b>377,835,394</b>	<b>269,134,250</b>	<b>108,701,144</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN  
Rp0,00

#### C.10. Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas  
Rp1.210.919.811,00

#### C.11. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.210.919.811,00 dan Rp2.277.987.363,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan  
PNBP  
Rp0,00

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari

Tabel 22 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beban Pegawai  
Rp6.639.468.031,  
00

### D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.639.468.031 dan Rp8.887.404.738,00 dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6,635,012,031	8,859,482,738	(25.11)
Belanja Lembur	4,456,000	27,922,000	(84.04)
Belanja Vakasi	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>6,639,468,031</b>	<b>8,887,404,738</b>	<b>(25.29)</b>

Beban Pegawai Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 25.29 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan adanya mutasi pegawai peneliti ke Badan Riset dan Inovasi Nasional sebanyak 18 pegawai terhitung mulai April s.d Agustus 2022.

Beban Persediaan  
Rp130.909.443,00

### D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar 130.909.443,00 dan Rp128,607,698,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

#### *Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022*

Uraian Jenis Beban	TA. 2023	TA. 2022	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	130,909,443	128,607,698	1.79
Beban Persediaan bahan baku			
Jumlah Beban Persediaan	130,909,443	128,607,698	1.79

Beban persediaan terjadi kenaikan sebesar 1.79 persen karena adanya penambahan anggaran persediaan. Kebijakan nilai yang digunakan menggunakan metode FIFO.

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp3.008.018.618,00

### D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.008.018.618 dan Rp2,152,825,301,00 Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut

#### *Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022*

Uraian Jenis Beban	TA. 2023	TA. 2022	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,465,011,042	1,531,167,315	(4.32)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	152,000	1,000,000	(84.80)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	121,320,000	125,176,000	(3.08)
Beban Barang Operasional Lainnya	103,528,917	83,050,500	24.66
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	19,812,435	152,228,288	(86.99)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	0	-
Beban Bahan	430,224,024	53,171,200	709.13
Beban Honor Output Kegiatan	88,980,000	43,900,000	102.69
Beban Barang Non Operasional Lainnya	51,000,000	56,300,000	(9.41)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Sewa	12,600,000	11,599,998	8.62
Beban Jasa Profesi	192,200,000	92,900,000	106.89
Beban Jasa Lainnya	523,190,200		
Beban Jasa Penanganan Pandemi COVID19	0	2,332,000	(100.00)
<b>Jumlah Beban Barang dan Jasa</b>	<b>3,008,018,618</b>	<b>2,152,825,301</b>	<b>39.72</b>

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 39.72 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Pada Tahun 2023, mempunyai kegiatan lebih banyak dibanding dengan Tahun 2022 yaitu kegiatan NSPK Kampung Nelayan Maju.

*Beban Pemeliharaan  
Rp937.151.401,00*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp937.151.401,00 dan Rp240,578,983,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323,225,801	226,431,759	42.75
Beban Persediaan pemeliharaan lainnya	613,925,600	14,147,224	4239.55
<b>Jumlah</b>	<b>937,151,401</b>	<b>240,578,983</b>	<b>289.54</b>

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 289.54 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan adanya penambahan anggaran biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yang merupakan pergeseran belanja pegawai ke belanja operasional.

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp2.585.703.687,  
00*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.585.703.687 dan Rp249.406.579,00

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan TA 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,924,567,731	146,950,100	1,209.67
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	229,851,000	57,750,000	298.01
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	431,284,956	44,706,479	864.70
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	68,400,000	0	
<b>Jumlah</b>	<b>2,585,703,687</b>	<b>249,406,579</b>	<b>936.74</b>

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 936.74 persen dikarenakan adanya penambahan anggaran NSPK Kampung Nelayan Maju

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp339.213.018,00

## D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp339.213.018 dan Rp466,741,391,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan TA 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	319,326,393	409,033,055	-21.93
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-	
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>319,326,393</b>	<b>409,033,055</b>	<b>-21.93</b>
Beban Amortisasi Software	19,886,625	57,708,336	-65.54
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>19,886,625</b>	<b>57,708,336</b>	<b>-65.54</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>339,213,018</b>	<b>466,741,391</b>	<b>-27.32</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi mengalami penurunan sebesar 27.32 persen disebabkan oleh penghapusan Aset di Tahun 2023

## D.8 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan  
Aset non Lancar  
Rp733.270.000,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp733.270.000 dan Rp0,00

Rincian pendapatan Pelepasan asset Non lancar untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Penghapusan ATL	733,270,000	-	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>733,270,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan dan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya.

Pelepasan Aset Tetap Lainnya berupa Buku telah dibuat Surat Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan ke Sekretariat BRSDMKP.

Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp  
Rp(721.020.000)

#### D.9. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(721.020.000) dan Rp65,164,106.

#### Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021	%
Pelepasan Aset Non Lancar	(733,270,000)	46,000,000	
Penerimaan Kembali Beban PegawaiTahun Anggaran yang Lalu	12,250,000	19,164,106	-36.08
	-	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(721,020,000)</b>	<b>65,164,106</b>	<b>-1206.47</b>

\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2019

#### D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp32.400,00 dan Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 30 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan Tabel berikut ini:

<b>Uraian Jenis Beban</b>	<b>Realisasi T.A. 2023</b>	<b>Realisasi T.A. 2022</b>
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	32,400	-
Total	32,400	

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp2.277.987.363,00*

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,277,987,363.00 dan Rp3.038.617.895.00

*Defisit LO*  
*Rp(14.355.036.598,00)*

### E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(14,355,036,598.00) dan Rp(12,060,400,584.00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Rp0,00*

### E.3. Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp57.294.600,00. Tidak terdapat koreksi.

*Transaksi antar entitas*  
*Rp13.298.760.086,00*

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13,298,760,086,00 dan Rp11,034,415,767,00 Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

Tabel 29. Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas	Nilai
Diterima dari entitas lain	12,250,000
Ditagihkan ke entitas lain	13,311,010,086
Transfer masuk	
Transfer keluar	
Pengesahan hibah langsung	0
Pengesahan Pengembalian	0
Hibah Langsung	
<b>Jumlah</b>	<b>13,298,760,086</b>

#### E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) / Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain/ditagihkan ke entitas lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada /KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(12.250.000,00) sedangkan DKEL sebesar Rp 13.311.010.086.00.

*Koreksi yang Menambah /Mengurangi Ekuitas Rp2.985.000,00*

#### E.5. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.985.000,00 dan Rp0,00. Jumlah per 31 Desember 2023 dan 2022 tersebut terdiri atas:

Uraian	2023	2022
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	-	-
Lain-Lain	2,985,000	-
<b>Total Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas</b>	<b>2,985,000</b>	<b>-</b>

*Ekuitas Akhir Rp 1.224.695.851,00*

#### E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.224.695.851,00 dan Rp2.277.987.363,00

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA SEMESTER II TAHUN 2023

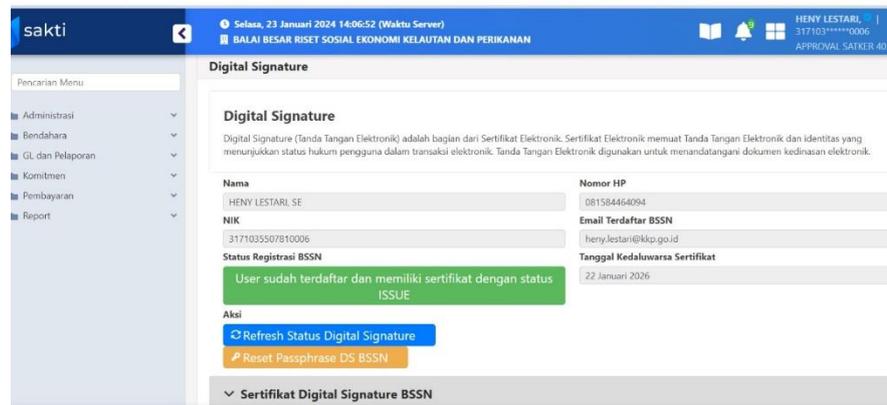
Tidak ada penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca

### F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Saat Catatan atas Laporan Keuangan ini di buat, Dalam Aplikasi MON Sakti Masih terdapat To Do list yaitu

1. Monitoring Sertifikat Digital Signature BSSN yang merupakan Tanda Tangan elektronik pejabat Penandata tangan SPM yang sudah di Registered dan statusnya sudah issued namun karena menunggu olah data Pelaporan Aplikasi SAKTI masih ada di to do list

Berikut Gambar sertifikat issued yang sudah terbit a.m Heny Lestari



2. Terdapat penyesuaian Saldo Akun Utang yang belum diterima tagihannya yang dikarenakan dari transaksi BAST gantung serta SPby. transaksi tersebut tidak bisa dihapuskan. antara lain:

Tanggal	Keterangan	Nilai
23/05/2023	00550/PB/403836/2023	600.000
08/09/2023	00044/UP_TUP/403836/2023	1.740.000
11/10/2023	00054/UP_TUP/403836/2023	1.697.500
25/10/2023	00064/UP_TUP/403836/2023	305.940

Melakukan penyesuaian jurnal manual untuk penyesuaian transaksi tersebut. Jurnal yang dibuat adalah:

	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
<b>593111</b> Beban Persediaan Konsumsi		4.343.440
<b>218111</b> Utang yang Belum Diterima Tagihannya	4.343.440	

#### **F.2.1. PROGRESS TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN**

Terdapat temuan pada satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan berupa Temuan Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai yang sedang melakukan Tugas Belajar.

Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terhadap Belanja Pegawai berupa:

1. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional Pegawai Tugas Belajar Bulan Maret 2022 sebanyak 1 orang. Terdapat Piutang sebesar 840.000,00 dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 32.400,00;
2. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Struktural Pegawai Tugas Belajar Belajar Bulan September 2022 s.d. Desember 2022 senilai Rp2.160.000 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih senilai 32.400 dan Bulan Januari s.d. Oktober 2023 senilai Rp6.480.000 dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih senilai 10.800 sebanyak 1 orang.

Melakukan penyesuaian jurnal manual untuk penyesuaian transaksi tersebut. Jurnal yang dibuat adalah:

Akun	Uraian		Debit	Kredit
115212	Piutang Lainnya		840,000	
391119		Koreksi Lainnya		840,000
391119	Koreksi Lainnya		4,200	
116212		Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		4,200
115212	Piutang Lainnya		6,480,000	
511123		Beban Tunjangan Struktural PNS		6,480,000
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		32,400	
116212		Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		32,400
115212	Piutang Lainnya		2,160,000	
391119		Koreksi Lainnya		2,160,000
391119	Koreksi Lainnya		10,800	
116212		Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		10,800

## F.2.2 KEBIJAKAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID 19

Berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19 salah satunya adanya kebijakan vaksinasi nasional COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada Tahun Anggaran (TA) 2021. Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, Menteri Keuangan (Menkeu) telah menyampaikan surat nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020

perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Di sisi belanja barang, penghematan belanja dalam *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga menasar pada belanja yang bersumber dari Rupiah Murni yang meliputi belanja honorarium (tim dan narasumber), perjalanan dinas dalam/luar negeri (termasuk untuk monev *on-site* dan kegiatan promosi, pameran, dan *roadshow* ke luar negeri), paket *meeting* (FGD, rapat kerja, *workshop*, seminar, konsinyering, dll), belanja jasa (termasuk kegiatan kajian yang melibatkan jasa konsultan), serta bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan merupakan arahan Presiden. Kementerian Keuangan memproyeksikan Rp33,2 triliun belanja barang dapat disisir dari jenis-jenis belanja tersebut setelah mengamankan belanja barang untuk operasional perkantoran, belanja langganan daya dan jasa, dan belanja sewa sarana dan prasarana perkantoran. Untuk belanja modal, Kementerian Keuangan menargetkan penghematan sebesar Rp25,8 triliun. Lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah tersebut disumbang oleh belanja modal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Meskipun demikian, pemotongan tersebut tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu pencapaian prioritas nasional dan penyelesaian *major project* (proyek prioritas strategis). Kementerian Keuangan memberikan rambu alokasi anggaran untuk tujuh bidang Prioritas Pembangunan Nasional sebagai belanja yang dikecualikan dari *refocusing* dan realokasi belanja. Adanya Pandemi COVID-19 mengakibatkan diberlakukannya penerapan Pembatasan Sosial menyebabkan berpengaruh terhadap anggaran dan realisa

### F.2.3. REVISI DIPA

1. **DIPA Awal** Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA- 032.12.2.403836/2023 kode DS:0903-2601-4024-7069 total pagu Rp. 10.550.000.000 terbit pada tanggal 30 November 2022;
2. **DIPA Revisi ke-1** Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA- SP DIPA- 032.12.2.403836/2023 DS:0903-

2601-4024-7069 total pagu Rp. 10.550.000.000 terbit pada tanggal 13 Februari 2021. Terdapat revisi Automatic Adjustment pada belanja pegawai dengan anggaran senilai Rp. 860.000.000, alokasi Automatic Adjustment tersebut bersumber dari rupiah murni (RM) dan Belanja Modal yang diprioritaskan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Tema revisi

- Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari rupiah murni (RM) dalam rangka Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2022

Tata cara revisi:

- Pagu anggaran Automatic Adjustment belanja Pegawai

Alasan / pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:

Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja

- a. Volume RO tetap

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022

3. **DIPA Revisi ke-2** Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA- 032.12.2.403836/2023 DS:0903-2601-4024-7069 total pagu Rp. 10.550.000.000 terbit pada tanggal 17 Maret 2023 DIPA Revisi ke-02 ini merupakan revisi Hal III DIPA

Tema Revisi:

- Ralat Administrasi

Mekanisme Revisi:

- Ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA)

Alasan / pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
- b. Mempercepat pencapaian kinerja K/L.

4. **DIPA Revisi ke-3** Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA- 032.12.2.403836/2023 dengan kode *Digital Stamp* 0903-2601-4024-7069 dan pagu anggaran Rp10.550.000.000,00 pada tanggal 14 Juli 2023. Revisi DIPA meliputi Revisi Administrasi, yaitu Revisi Halaman III DIPA dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L.
  
5. **DIPA Revisi ke-4** Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA- 032.12.2.403836/2023 dengan kode *Digital Stamp* 0903-2601-4024-7069 pagu anggaran Rp10.550.000.000,00 pada tanggal 10 Oktober 2023. Revisi DIPA meliputi Revisi Administrasi, yaitu Revisi Halaman III DIPA dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L.
  
6. **DIPA Revisi ke-5** Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA- 032.12.2.403836/2023 dengan kode *Digital Stamp* 0610-2811-0190-2050 dan pagu anggaran Rp13.550.000.000,00 pada tanggal 30 Oktober 2023. Revisi DIPA meliputi Revisi Anggaran terkait RO Prioritas Nasional, yaitu Pergeseran anggaran antar-program dari Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (032.12.HB) ke Program Diklat Vokasi (032.12.DL) sebesar Rp3.000.000.000,00 dalam rangka penyiapan *social engineering* di 20 Lokasi Kampung Nelayan Maju (Kalaju) Tahun 2024 dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L, serta meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi anggaran yang terbatas.
  
7. **DIPA Revisi ke-6** Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : SP DIPA- 032.12.2.403836/2023 dengan kode *Digital Stamp* 7157-2083-4617-3033 dan pagu anggaran Rp13.550.000.000,00 pada tanggal 21 November 2023. Revisi DIPA meliputi Revisi Administrasi, yaitu revisi pergeseran anggaran antar Jenis Belanja pada RO 2378.EBA.994 (Layanan Perkantoran), pada komponen 001 (Gaji dan Tunjangan) dengan detail senilai Rp615.000.000,00 untuk memenuhi komponen 002

(Operasional dan Pemeliharaan Kantor) dengan detail senilai Rp614.000.000,00 dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian kinerja K/L.

### **F.2.3. SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA ANGGARAN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.82//MEN/KU.611/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.527/KPA/BRSDM-BBRSEKP/KU.111/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen : Fahru Rachman, S.E., M.M

Pejabat : Heny Lestari, S.E

Penandatanganan/Penguji

SPM

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.2/KPA/BRSDM-BBRSEKP/KU.111/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Balai Besar Riset Sosial

Ekonomi Kelautan dan Perikanan Maka susunan Pengelola Anggaran lingkup Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Bendahara Pengeluaran : Ahmad Akhmal, A.Md

Bendahara Gaji : Sujana

## Lampiran A1

### Kantor Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Tot.AK.Penyusutan	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2023	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023	Per 31-12-2023
<b>A Tanah</b>								
1	Tanah	-	0	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>B Peralatan dan Mesin</b>								
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2,290,772,875	1,755,401,443	126,828,573		1,882,230,016	408,542,859
2	Alat Kantor	5	305,789,884	292,049,884	9,160,000		301,209,884	4,580,000
3	Alat Rumah Tangga	5	265,769,942	248,421,742	12,919,200		261,340,942	4,429,000
4	Alat Studio	5	205,018,210	197,548,210	4,980,000		202,528,210	2,490,000
5	Unit Alat Laboratorium	5	94,388,000	53,093,250	11,798,500		64,891,750	29,496,250
6	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	30,370,840	21,259,587	2,024,723		23,284,310	7,086,530
7	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		97,055,945	80,879,953	6,470,397		87,350,350	9,705,595
8	Persenjataan Non Senjata Api	5	16,643,240	16,643,240			16,643,240	-
9	Komputer Unit	4	1,824,004,797	1,571,265,547	145,145,000		1,716,410,547	107,594,250
10	Peralatan Komputer	4	833,655,985	833,655,985	-		833,655,985	-
<b>Jumlah</b>			<b>5,963,469,718</b>	<b>5,070,218,841</b>	<b>319,326,393</b>	<b>-</b>	<b>5,389,545,234</b>	<b>573,924,484</b>
<b>C Gedung dan Bangunan</b>								
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>D Jaringan</b>								
1	Jaringan Listrik	40	0	-	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	20	0	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>E Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>								
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1		-	-	-		-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>					<b>-</b>
<b>F Aset Tetap Lainnya</b>								
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		390,726,640	-	-	-	-	390,726,640
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro		126,477,148	-	-	-	-	126,477,148
<b>Jumlah</b>			<b>517,203,788</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>517,203,788</b>
<b>G Aset Lainnya</b>								
1	Bahan Perpustakaan Tercetak		0	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>Total</b>			<b>6,480,673,506</b>	<b>5,070,218,841</b>	<b>319,326,393</b>	<b>-</b>	<b>5,389,545,234</b>	<b>1,091,128,272</b>

\* Beban Amortisasi

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi, Kelautan dan Perikanan

A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani